

Analisis Konflik dalam Pengembangan Objek Wisata Puncak Panenteng Kabupaten Kepulauan Sangihe (Studi Kasus Desa Tola Kecamatan Tabukan Utara)

Alprince Trisnawati Kadamehang¹, Veronika Salem², Hamdi Gugule³

^{1,2,3}Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email: ¹wattykadamehangkatiandagho@gmail.com, ²veronikesalem@unima.ac.id, ³hamdigugule@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 26, 2023

Revised November 30, 2023

Accepted November 30, 2023

Kata Kunci: Analisis Konflik,
Pengembangan, Objek Wisata



Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil analisis konflik dalam pengembangan objek wisata Puncak Panenteng dan untuk mengetahui mengapa pemilik tanah objek wisata Puncak Panenteng menolak izin Dinas Pariwisata untuk membangun dan mengembangkan objek wisata Puncak Panenteng. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, termasuk pendekatan kualitatif deskriptif analitik, dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil temuan mengungkapkan bahwa masyarakat pemilik objek wisata Puncak Panenteng ingin mengelola dan mengembangkan sendiri objek wisata Puncak Panenteng dan tidak memberikan izin kepada Dinas Pariwisata untuk mengelola dan mengembangkan objek wisata Puncak Panenteng karena pemilik lahan tidak menginginkan pemerintah untuk memiliki akses ke tanah pribadi mereka. Menjadi objek wisata sekaligus tempat menanam bagi masyarakat desa Tola. Objek wisata puncak Panenteng juga dikelola dan difasilitasi oleh pemerintah desa Tola. Pemerintah desa Tola membangun jalur akses dari desa Tola menuju destinasi wisata puncak Panenteng sebagai salah satu layanannya.

Abstract

The primary goal of this research is to determine how conflict analysis results in the development of the Puncak Panenteng tourist attraction and to determine why the land owner of the Puncak Panenteng tourist attraction refuses to allow the Tourism Office to build and develop the Puncak Panenteng tourist attraction. This study employs qualitative methodologies, including qualitative descriptive analytic approaches, and data is gathered through interviews, observation, and documentation. The findings revealed that the people who owned the Puncak Panenteng tourist attraction wanted to manage and develop their own Puncak Panenteng tourist attraction and did not grant permission to the Tourism Office to manage and develop the Puncak Panenteng tourist attraction because the land owners did not want the government to have access to their private land. It is a tourist attraction as well as a planting area for the Tola village community. The Panenteng peak tourist attraction is likewise managed and facilitated by the Tola village authority. The Tola village authority built an access route from Tola village to the Panenteng peak tourist destination as one of its services.

Keywords: Conflict Analysis, Development, Attractions

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan peninggalan sejarah dan budaya yang tinggi (Mesra, 2023a).

ETIC (EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL)

Volume 1, Nomor 1, Tahun 2023

Copyright ©2023

Kuantitas sumber daya alam yang ada dapat mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dikelola dengan baik berdasarkan apa yang paling diminati oleh masyarakat, sehingga pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak memboroskan waktu atau materi karena kegagalan dalam pengelolaan sumber daya (Blackburn, 1999).

Pariwisata (Osin et al., 2019) merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya alam yang dapat memiliki nilai ekonomi tinggi bagi suatu daerah yang mengelola sumber daya alam menjadi tempat wisata yang dapat menarik pengunjung baik dari dalam maupun dari luar negeri. Selain memiliki nilai ekonomi yang tinggi, pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa bangga terhadap negara, sehingga akan tumbuh masyarakat yang lebih peduli terhadap suatu negara (Jayanti, 2019).

Pariwisata (Soemitra et al., 2022) adalah sesuatu yang diminati setiap orang karena dapat menghilangkan kebosanan, menumbuhkan kreativitas, dan meningkatkan produktivitas individu. Pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang memiliki fungsi yang sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional di era globalisasi saat ini. Industri ini selain menjadi sumber devisa yang kokoh, juga mampu menyerap tenaga kerja dan mendukung perluasan investasi (Yakup, 2019).

Untuk memperkuat industri ini, pemerintah bekerja keras menciptakan strategi dan kebijakan yang akan membantu pertumbuhannya. Salah satu kebijakan tersebut adalah menyelidiki, membuat katalog, dan mengembangkan artefak pariwisata yang ada sebagai daya tarik wisata utama (Isdarmanto, 2020).

Pengembangan sektor pariwisata merupakan tindakan yang realistis dan logis, dengan mempertimbangkan dampak positif yang muncul, seperti perluasan peluang usaha hotel, biro perjalanan, dan toko cinderamata, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pemeliharannya. keamanan dan ketertiban, meskipun ada "juga" hal-hal yang berdampak negatif (Pariwisata & Kreatif, 2018).

Tujuan pembangunan pariwisata adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghilangkan kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan lingkungan dan sumber daya alam, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkokoh jati diri dan persatuan bangsa. , dan terakhir untuk memperkuat persatuan internasional (Pradana & Mahendra, 2021) .

Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata antara lain: mengintensifkan promosi pariwisata, penyiapan dan peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas produk pariwisata, pengembangan kawasan wisata dan produk baru khususnya di Indonesia bagian timur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (Sumber Daya Manusia) di bidang pariwisata, dan melaksanakan kampanye nasional yang berkelanjutan (Gugule et al., 2022).

Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki potensi wisata. Pemerintah Kota Kabupaten Kepulauan Sangihe giat berupaya memaksimalkan pengembangan pariwisata. Pertumbuhan pariwisata sebagai industri sangat penting bagi berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Kabupaten Kepulauan Sangihe dicita-citakan sebagai sektor yang dapat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), memberdayakan masyarakat sekitar, menciptakan lapangan kerja, dan menjual benda-benda budaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kepariwisataan harus diselenggarakan secara bertahap agar dapat meraup manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki banyak potensi wisata karena memiliki banyak keistimewaan yang luar biasa. Kawasan perbatasan ini layak menjadi salah satu kunjungan

wisata di Provinsi Sulawesi Utara karena kepulauan tropis dan banyaknya pulau serta keindahan alamnya yang begitu indah dan berbagai tempat bersejarah merupakan hal yang patut dijunjung tinggi. Semua keindahan alam inilah yang menjadikan Kepulauan Sangihe sebagai kepulauan yang unik dan indah, menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.

Potensi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe meliputi wisata alam, wisata budaya, dan agrowisata yang mungkin menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Sangihe. Selain ragam objek wisata, juga mencakup keragaman budaya, variasi budaya, dan adat istiadat masyarakat di setiap lokasi wisata, yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata Sangihe. Namun, meskipun masih banyak objek wisata yang layak untuk dikembangkan dan dilestarikan, beberapa objek wisata yang potensial dan menjanjikan belum mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Akibatnya, belum mampu menarik wisatawan asing dan domestik sebanyak-banyaknya. Menurut hasil survey awal, salah satu objek wisata di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya desa Tola adalah objek wisata puncak Panenteng, dimana pengembangan objek wisata puncak Panenteng masih belum optimal, dan masih belum terekspos dengan baik. di kalangan masyarakat, sehingga masih minim pengunjung untuk berwisata.

Hal ini juga menunjukkan bahwa pariwisata bukan merupakan program prioritas utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengingat pengelolaan sektor pariwisata masih belum ideal sehingga pelayanan dan infrastruktur penunjang pariwisata belum terkelola dengan baik. Padahal pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah melakukan berbagai upaya strategis untuk mengelolanya, namun belum dikembangkan secara efektif, serta masih banyak kekurangan dan kendala yang menyebabkan kurangnya minat wisatawan lokal maupun mancanegara.

B. Metode

Penulis menggunakan teknik kualitatif dalam studi mereka, dan penelitian ini bersifat deskriptif, menawarkan akun atau penjelasan yang akurat tentang tantangan yang dihadapi, dengan tujuan membuat deskripsi yang sistematis, faktual, dan benar tentang fenomena sosial atau alam (Afrizal, 2014).

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan pada kondisi alam (Natural Setting). Peneliti menggunakan strategi pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data analisis konflik dalam pembangunan objek wisata Puncak Panenteng.

Tindakan berikut dapat diambil untuk memeriksa (analisis) data (Huberman, 1992):

1. Reduksi Data

Reduksi data mencakup meringkas, memilih poin-poin utama, memfokuskan pada apa yang relevan, mencari pola dan tema, dan menghilangkan hal-hal yang tidak diperlukan. Jadi reduksi data dilakukan dengan cara meringkas apa yang berhubungan dengan data mengenai apa saja keterlibatan pemerintah dalam membangun objek wisata di Puncak Lose Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Data Display (Penyajian Data)

Tahap selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Data akan dipilah dalam pola hubungan dan diberikan dalam bentuk bagan, uraian singkat, dan laporan tekstual eksplanasi (yang bersifat naratif) melalui penyajian data tersebut.

3. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan)

Menurut Milles dan Hubberman, tahap terakhir dalam analisis kualitatif data adalah temuan-temuan verifikasi. Hasil awal masih bersifat sementara dan akan berubah jika bukti kuat tidak ditemukan untuk membenarkan langkah pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika temuan tahap awal terungkap oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disajikan kredibel atau dapat dipercaya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan objek wisata Puncak Panenteng

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak YD, ia menjelaskan bahwa sejauh ini pemerintah cukup berperan dalam menunjang pengembangan objek wisata Puncak Panenteng. Salah satu peran pemerintah yaitu mengupayakan bantuan dan membuat proposal kepada Dinas Pariwisata agar Dinas Pariwisata dapat memberikan bantuan untuk pengembangan Puncak Panenteng. Dan setiap ada pertemuan atau musrenbang, pemerintah desa selalu mengangkat Puncak Panenteng menjadi topik pembicaraan agar bisa diupayakan dalam pengembangan objek wisata.

Tetapi ada kendala sehingga objek wisata puncak paneneteng sampai sekarang belum berkembang dan masih belum menarik minat para wisatawan untuk datang berkunjung dikarenakan pemilik lahan tidak mengizinkan dinas pariwisata untuk mengembangkan objek wisata puncak panenteng.

Dinas pariwisata sudah datang ke lokasi yaitu di Puncak Panenteng sebanyak 2 kali untuk melakukan pengembangan di lokasi tersebut dan minta ijin kepada pemilik lahan tetapi pemilik lahannya sendiri yang tidak mengizinkan adanya pengembangan dari dinas pariwisata sehingga pemerintah desa juga tidak bisa mengambil keputusan dan tidak bisa bertindak lebih atau memaksakan kehendak dari pemilik lahan tersebut karena yang punya kewenangan hanyalah pemilik lahan untuk lahan yang akan di jadikan objek wisata.

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan di atas maka penulis menganalisis bahwa pemerintah desa kampung tola cukup berperan dalam pengembangan objek wisata puncak panenteng, pemerintah juga sangat mengharapkan adanya pembangunan dan pengembangan dalam objek wisata tersebut agar kelak objek wisata puncak panenteng dapat menjadi objek wisata yang terkenal dan banyak wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang datang untuk berkunjung.

Sehingga dari situ bisa membantu masyarakat kampung tola dalam hal perekonomian dengan bertambahnya lapangan pekerjaan dan kesempatan bagi masyarakat untuk membuat usaha dan juga lebih memperkenalkan wisata alam yang ada di kampung tola. Masyarakat kampung tola selain berkebun juga bisa membuka usaha kecil-kecilan seperti warung kopi dan menjual gorengan dan snack-snack untuk para pengunjung. Pemerintah desa kampung tola ingin sekali bekerja sama dengan dinas-dinas yang terkait, seperti dinas pariwisata agar objek wisata puncak panenteng menjadi objek wisata yang lebih maju dan para wisatawan yang sudah pernah datang berkunjung boleh kembali berkunjung.

2. Peran Pemerintah Desa dalam memfasilitasi pengembangan objek wisata Puncak Panenteng

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak. R.D, ia menjelaskan bahwa untuk menunjang dan mengupayakan pengembangan objek wisata Puncak Panenteng, pemerintah membuat program pembangunan jalan menuju puncak panenteng dengan menggunakan anggaran desa, pembangunan jalan sekitar 1.5km yang sudah dibuat dan masih ada sekitar 400m yang tersisa untuk sampai ke puncak panenteng dan itu masih diupayakan oleh pemerintah perkiraan tahun ini akan diadakan pembangunan lanjutan. Jalan itu merupakan jalan pintas untuk sampai ke Puncak Panenteng.

Alasan pemerintah desa juga membuat jalan pintas tersebut selain menunjang pengembangan objek wisata juga agar supaya masyarakat kampung Tola lebih muda untuk pergi berkebun di area sekitar Puncak Panenteng karena ada beberapa orang masyarakat Kampung Tola yang memiliki lahan perkebunan milik pribadi yang digunakan untuk berkebun di area sekitar Puncak Panenteng. Jadi tujuan dari program pemerintah desa selain untuk pengembangan atau memfasilitasi objek wisata Puncak Panenteng ini juga untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan di atas maka penulis menganalisis bahwa peran pemerintah desa dalam memfasilitasi pengembangan objek wisata puncak panenteng yaitu dengan melakukan pembangunan jalan sekitar 1.5km sebagai akses menuju lahan perkebunan sekaligus objek wisata puncak panenteng.

Untuk sekarang hanya pembangunan jalan tersebut yang menjadi fasilitas dari Pemerintah desa dengan menggunakan anggaran desa, karena untuk pengembangan objek wisata pemerintah desa harus ada kerja sama dengan masyarakat dan dinas-dinas yang terkait karena memerlukan anggaran yang cukup besar. Karena anggaran dari dana desa masih sangat terbatas. Dan untuk rencana kedepannya pemerintah desa akan membuat plang nama wisata atau papan nama yang menunjukkan nama objek wisata puncak panenteng agar lebih mempermudah para wisatawan untuk datang berkunjung.

3. Alasan pemilik lahan tidak menyetujui Dinas Pariwisata mengembangkan objek wisata Puncak Panenteng

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan bapak N.D, ia menjelaskan bahwa alasan ia menolak atau tidak mengizinkan Dinas Pariwisata mengembangkan objek wisata puncak panenteng, karena ia tidak ingin tanah perkebunan miliknya yang dijadikan objek wisata tersebut dihibahkan ke pemerintah. Sebab salah satu syarat pengembangan objek wisata dari pemerintah adalah tanah milik pribadi harus dihibahkan ke pemerintah dan akan menjadi aset pemerintah karena pemerintah tidak bisa membangun di lahan pribadi masyarakat.

Kemudian bapak N.D menjelaskan juga bahwa alasan ia tidak mengizinkan dinas pariwisata mengembangkan objek wisata puncak panenteng karena lahan miliknya selain dijadikan objek wisata juga merupakan lahan perkebunan yang selama ini menjadi penunjang

kehidupan bapak N.D bersama keluarga, karena ada beberapa jenis tanaman yang ditanam oleh bapak N.D yang hasilnya dapat dipanen dan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti rempah-rempah, sayur-sayuran dan buah-buahan.

Jika lahan miliknya dihibahkan ke pemerintah ia sudah tidak bisa berkebun lagi di lahan tersebut dan darimana ia akan mendapatkan penghasilan untuk biaya hidup sehari-hari (ujar bapak N.D), maka dari itu ia tidak mengijinkannya dan memilih mengelola atau mengembangkan sendiri lahan perkebunannya dan di jadikan objek wisata agar selain mendapat penghasilan dari objek wisata yang dimaksud walaupun penghasilannya tidak besar karena hanya menjual gorengan dan minuman panas tetapi bisa menambah-nambah biaya dan juga ia bisa dapat penghasilan dari hasil perkebunan di lahan tersebut.

Bapak N.D bersama istri membangun rumah kecil atau pondok untuk dijadikan tempat tinggal dan juga tempat untuk jualan yaitu semacam warung kopi dan juga tersedia gorengan bagi wisatawan yang datang untuk berkunjung. Dan untuk mengambil gambar di objek wisata tersebut tidak dipungut biaya atau gratis asalkan wisatawan atau pengunjung berbelanja di warung bapak N.D.

Dan untuk dana yang digunakan membangun pondok, wahana yang dijadikan spot foto itu menggunakan dana pribadi dari bapak. N.D selaku pemilik lahan, dan dana tersebut didapat dari hasil perkebunan yang dijual sehingga menghasilkan uang dan sebagian uang digunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari sebagiannya juga untuk pengembangan objek wisata puncak panenteng misalnya dalam pembuatan pondok, dan spot foto.

Untuk sarana dan prasarana dalam pengembangan objek wisata puncak panenteng belum memadai karena belum ada fasilitas-fasilitas yang mendukung dan menunjang pengelolaan dan pengembangan objek wisata tersebut, sangat jauh untuk dikatakan sebagai objek wisata tetapi akan diupayakan untuk menjadi objek wisata yang berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan di atas maka penulis menganalisis bahwa terjadi kendala dalam pengembangan objek wisata puncak panenteng dimana dinas pariwisata ingin sekali mengembangkan dan mengelola objek wisata tersebut tetapi pemilik lahan tidak mengijinkannya karena tidak mau lahan perkebunan milik pribadi sekaligus dijadikan objek wisata tersebut dihibahkan ke pemerintah karena mereka tidak bisa berkebun lagi karena sudah menjadi aset pemerintah.

Maka dari itu pengembangan hanya bisa dilakukan oleh pemilik lahan tersebut tidak boleh ada campur tangan dari dinas pariwisata atau dinas-dinas yang terkait yang ingin mengembangkan dan mengelola objek wisata puncak panenteng. Maka dari itu juga pengelolaan dan pengembangan objek wisata puncak panenteng sangat lambat karena tidak ada campur tangan dari dinas-dinas yang terkait dan tidak ada anggaran dana yang memadai.

4. Dukungan masyarakat umum dalam pengembangan objek wisata puncak panenteng

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat umum bapak. A.S, ia menjelaskan bahwa sebagai masyarakat umum ia sangat mendukung dengan setiap pembangunan atau pengembangan untuk objek wisata yang ada di kampung Tola salah satunya objek wisata

puncak panenteng, baik pengembangan dari pemerintah desa, dinas pariwisata maupun dari masyarakat pemilik lahan. Karena menurut bapak A.S dengan adanya objek wisata di kampung tola bisa membantu juga dalam potensi perekonomian masyarakat jika objek wisata tersebut dikembangkan dan dikelola dengan baik.

Selama pengembangan itu memajukan, mensejahterakan dan membantu perekonomian masyarakat kampung Tola, sebagai masyarakat hal yang dilakukan hanya bisa mendukung pengembangan tersebut. Maka dari itu sebagai masyarakat umum sangat mengharapkan agar objek wisata puncak panenteng dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik agar kedepannya dapat membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat kampung tola dan sekitarnya. Salah satunya masyarakat bisa membuka usaha kecil-kecilan seperti berjualan di sekitar objek wisata.

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan di atas maka penulis menganalisis bahwa masyarakat sangat mendukung dalam pengembangan objek wisata puncak panenteng. Masyarakat sangat berharap agar supaya pengembangan objek wisata puncak panenteng segera dilaksanakan agar masyarakat mendapatkan dampak yang sangat positif seperti; terbukanya lapangan pekerjaan, bertambahnya kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan, dan semakin dikenalnya kebudayaan dan wisata alam oleh para wisatawan.

5. Tanggapan tokoh masyarakat terhadap puncak panenteng yang tidak diijinkan oleh pemilik lahan dikembangkan atau dikelola oleh Dinas Pariwisata

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat bapak. A.J, ia menjelaskan bahwa sejauh ini ia tidak dapat memberikan tanggapan lebih karena itu sudah menjadi keputusan dari bapak N.D selaku pemilik lahan, ia sebagai masyarakat umum yang tidak memiliki lahan di lokasi yang akan dijadikan objek wisata tersebut tidak memiliki hak untuk melarang atau membatasi apa yang sudah menjadi keputusan dari pemilik lahan.

Namun kami juga sebagai masyarakat sangat-sangat mengharapkan objek wisata puncak panenteng di kelola oleh pemerintah dan dinas-dinas yang terkait agar dapat dipromosikan dan adanya infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang akan dibangun. Karena untuk mengembangkan objek wisata harus ada kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, kalau hanya di kelola dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri objek wisata tersebut masih belum menarik dan belum bisa dipromosikan dengan baik karena belum ada infrastuktur dan fasilitas-fasilitas yang menunjang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan di atas maka penulis menganalisis bahwa salah satu tokoh masyarakat tidak dapat memberikan tanggapan lebih karena itu sudah menjadi keputusan dari pemilik lahan. Tetapi ia selaku tokoh masyarakat sangat mengharapkan pemerintah dan dinas-dinas yang terkait ikut serta dalam pengembangan objek wisata puncak panenteng. Karena pemerintah memiliki peranan yang sangat sentral dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata.

Peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata adalah menyediakan infrastruktur, memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan wisata, pengaturan promosi umum keluar negeri. Tidak di pungkiri bahwa hampir

seluruh Indonesia memiliki potensi pariwisata, maka yang perlu di perhatikan adalah sarana transportasi, keadaan infrastruktur dan sarana-sarana pariwisata lainnya.

6. Tanggapan Dinas Pariwisata tentang alasan pemilik lahan tidak mengizinkan pengembangan objek wisata Puncak Panenteng

Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas pariwisata dengan ibu Y.S selaku Kabid Destinasi, ia mengatakan bahwa mereka sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena tidak mendapatkan ijin dari pemilik lahan untuk mengembangkan objek wisata tersebut. Padahal dinas pariwisata sudah mendapatkan bantuan dana khusus untuk mengelola dan mengembangkan objek wisata tersebut, rencana pembangunan awal dinas pariwisata akan membangun 10 unit gazebo dan itu boleh dikelola oleh masyarakat misalnya untuk dijadikan tempat bersantai bagi para pengunjung dan juga bisa digunakan untuk tempat makan, jadi itu juga bisa membantu masyarakat dalam melakukan usaha.

Tetapi karena masyarakat pemilik lahan menolak dan tidak mengijinkannya maka bantuan dana dari pemerintah pusat yang sudah disiapkan untuk membangun dan mengembangkan objek wisata puncak panenteng dikembalikan lagi dan sudah tidak ada pengembangan dari Dinas Pariwisata.

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan diatas maka penulis menganalisis bahwa Dinas Pariwisata tidak mendapatkan ijin dari pemilik lahan yang dijadikan objek wisata puncak panenteng. Jadi dinas pariwisata sudah tidak melanjutkan rencana pengembangan di objek wisata tersebut dan anggaran dana dari pemerintah pusat telah dikembalikan lagi.

Seharusnya masyarakat pemilik lahan menyetujui dinas pariwisata mengembangkan dan mengelola objek wisata puncak panenteng karena peran dari dinas pariwisata dan pemerintah sangat diperlukan dalam pengembangan setiap objek wisata mulai dari sarana dan prasarana, infrastruktur sekaligus fasilitas-fasilitas penunjang untu kemajuan objek wisata. Peran dinas pariwisata sebagai motivator, fasilitator dan dinamisator.

Berdasarkan analisis data melalui wawancara yang dilakukan penulis tentang Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan objek wisata Puncak Panenteng adalah pemerintah desa telah mengupayakan bantuan dan memohon kerjasama dengan dinas-dinas terkait seeperti dinas pariwisata untuk mengembangkan objek wisata puncak panenteng. Karena pemerintah desa juga ingin objek wisata puncak panenteng lebih dikembangkan agar bisa berpotensi bagi perekonomian masyarakat kampung Tola.

Namun adapun kendala dalam pengembangan objek wisata puncak panenteng ini yaitu lahan objek wisata puncak panenteng adalah lahan pribadi milik masyarakat kampung Tola. Jadi jika akan dilaksanakan pengelolaan dan pengembangan objek wisata Puncak Panenteng harus seijin dengan masyarat pemilik lahan objek wisata puncak panenteng. Dinas pariwisata dan pemerintah Desa Tola telah bekerja sama untuk membangun dan mengembangkan objek wisata puncak panenteng, namun sebelum adanya pembangunan dan pengembangan pemerintah desa dan dinas pariwisata melangsungkan pertemuan dengan masyarakat pemilik lahan untuk mengkonfismasikan apakah mengenai pembangunan dan pengembangan objek wisata puncak panenteng.

Tetapi masyarakat pemilik lahan tidak menyetujui dan tidak mengizinkan objek wisata puncak panenteng dikelola oleh dinas pariwisata dengan alasan lahan pribadi milik mereka tidak ingin dihibahkan ke pemerintah. Padahal pengembangan suatu sektor pariwisata tidak terlepas dari peran pemerintah dan dinas-dinas yang terkait. Pengembangan objek wisata harus dilakukan dan diatur oleh pemerintah desa, dinas-dinas terkait dan pemerintah kabupaten dan pusat serta bekerja sama juga dengan masyarakat agar supaya objek wisata puncak panenteng dapat berkembang dan bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa selaku pemerintah desa Tola, pemerintah desa sementara mengupayakan pengembangan objek wisata puncak panenteng agar objek wisata puncak panenteng dapat menarik minat para wisatawan dan pengunjung untuk datang berkunjung.

Pemerintah desa ingin sekali membangun fasilitas-fasilitas, infrastruktur, sarana dan prasarana untuk pengembangan objek wisata puncak panenteng, tetapi yang menjadi kendalanya adalah anggaran dana yang tidak mencukupi dalam melakukan pembangunan fasilitas-fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana. Karena untuk membangun dan mengembangkan objek wisata tersebut harus memiliki anggaran dana yang besar dan itu tidak dimiliki oleh pemerintah desa maka dari itu harus ada kerjasama dengan dinas-dinas yang terkait dan pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa, peran pemerintah desa dalam memfasilitasi pengembangan objek wisata puncak panenteng adalah pemerintah desa telah melakukan pembangunan jalan menuju puncak panenteng. Jalan yang dibangun sepanjang 1.5km dan masih ada sekitar 400m yang tersisa untuk sampai ke puncak panenteng dan itu masih diupayakan oleh pemerintah perkiraan tahun ini akan diadakan pembangunan lanjutan. Jalan itu merupakan jalan pintas dari kampung Tola untuk sampai ke Puncak Panenteng.

Dan dana yang digunakan dalam melakukan pembangunan jalan tersebut yaitu menggunakan anggaran dana desa, pemerintah desa juga ingin membangun fasilitas-fasilitas yang lainnya agar semakin menunjang pengembangan objek wisata puncak panenteng namun masih ada hal-hal lain juga yang lebih penting yang membutuhkan anggaran dana desa, jadi baru pembangunan jalan tersebut yang dapat dilakukan oleh pemerintah kampung Tola.

Kedepannya jika ada anggaran dana desa yang cukup besar pemerintah desa akan membangun fasilitas-fasilitas untuk menunjang objek wisata tersebut seperti membuat plang nama wisata atau papan nama yang menunjukkan nama objek wisata puncak panenteng agar lebih mempermudah para wisatawan untuk datang berkunjung namun itu juga harus atas seijin dengan pemilik lahan yang lahannya dijadikan objek wisata puncak panenteng.

Tetapi dalam pengembangan (B & Mesra, 2023) atau menciptakan tempat wisata pemerintah desa mempunyai peran penting karena sektor pariwisata tidak dapat berkembang secara maksimal jika tidak ada campur tangan dari pemerintah terutama dalam penyediaan akses jalan, mencari wisatawan dan mempromosikan objek wisata tersebut.

Selanjutnya dari hasil wawancara peneliti mengenai alasan pemilik lahan tidak menyetujui pengembangan objek wisata Puncak Panenteng dari Dinas Pariwisata ada dua

alasan yang dikemukakan oleh masyarakat pemilik lahan, yang pertama masyarakat pemilik lahan tidak ingin lahan milik pribadi yang dijadikan objek wisata puncak panenteng dihibahkan ke pemerintah. Salah satu syarat pemerintah membangun dan mengembangkan objek wisata yaitu tanah/lahan pribadi milik masyarakat harus dihibahkan ke pemerintah dan akan menjadi asset pemerintah karena pemerintah tidak bisa membangun dan mengelola di tanah/lahan pribadi milik masyarakat.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1666 hibah (Mesra, 2023b) adalah suatu pemberian oleh seseorang yang masih hidup kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Berbeda dengan harta warisan, biasanya hibah dapat dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan atau hubungan darah. Itulah mengapa hibah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam urusan sosial, kenegaraan, pendidikan, agama, dan lain sebagainya.

Hibah memberikan banyak manfaat, terutama bagi pihak penerima, salah satunya yaitu penerima dapat merasakan kebahagiaan dari hasil pemberian yang ia dapatkan. Selain itu, pemberian hibah kepada orang yang berhak juga bisa mepererat hubungan dengan lebih baik. Salah satu manfaat yang bisa didapatkan yaitu saat seseorang atau satu pihak memberikan hibah dalam bentuk tanah. Dalam hal ini, tanah tersebut akan sangat berguna bagi masyarakat yang nanti akan menggunakannya (Hidayat et al., 2023).

Hibah tanah ini bisa dijadikan kepentingan sosial, seperti tempat ibadah, sekolah, yayasan, tempat umum, dan lain sebagainya. Alasan yang kedua karena lahan yang dijadikan objek wisata juga merupakan lahan perkebunan yang selama ini menjadi salah satu mata pencaharian mereka. Jika tanah/lahan dari objek wisata tersebut dihibahkan ke pemerintah mereka sudah tidak bisa lagi berkebeban di area tersebut karena sudah menjadi aset pemerintah.

Tetapi dari dinas pariwisata sudah menjelaskan bahwa jika lahan objek wisata tersebut sudah dihibahkan ke pemerintah dan pemerintah sudah membangun dan mengembangkan objek wisata puncak panenteng, masyarakat bisa mengelola objek wisata tersebut. Contohnya pemerintah akan membangun gazebo maka pemerintah mengijinkan masyarakat menggunakan gazebo sebagai tempat untuk para wisatawan duduk bersantai sambil minum kopi, teh atau minuman hangat lainnya.

Jadi masyarakat bisa membuka usaha menjual makanan (Mesra et al., 2021), minuman, gorengan, snack-snack dan sebagainya dan para pengunjung bisa duduk bersantai di gazebo. Dan itu bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat dan bisa membantu dalam sektor perekonomian masyarakat. Tetapi masyarakat pemilik lahan tidak menyetujuinya dan memilih mengelola dan mengembangkan sendiri objek wisata puncak panenteng.

Selanjutnya dari hasil wawancara peneliti dukungan masyarakat umum dalam pengembangan objek wisata puncak panenteng masyarakat sangat mendukung akan pengembangan objek wisata puncak panenteng, mereka sangat senang dan sangat mengharapkan jika ada pengembangan dengan objek wisata puncak panenteng agar supaya masyarakat sekitar punya peluang untuk membuka usaha kecil-kecilan lewat tempat wisata ini dan bisa meningkatkan pendapatan dari masyarakat.

Selanjutnya dari hasil wawancara peneliti tanggapan tokoh masyarakat terhadap puncak panenteng yang tidak diijinkan oleh pemilik lahan dikembangkan atau dikelola oleh Dinas Pariwisata tidak ada tanggapan dari tokoh masyarakat karena sudah menjadi keputusan dari masyarakat pemilik lahan. Tetapi alangkah baiknya jika pemilik lahan menyetujui tawaran dari dinas pariwisata karena sebagai masyarakat juga sangat mengharapkan adanya pengengelolaan dan pengembangan objek wisata yang lebih baik agar bisa berdampak positif bagi masyarakat terlebih khusus di sektor perkonomian.

Selanjutnya dari hasil wawancara peneliti tanggapan Dinas Pariwisata tentang alasan pemilik lahan tidak mengijinkan pengembangan objek wisata Puncak Panenteng melihat dari dua alasan yang sudah dikemukakan oleh masyarakat pemilik lahan dinas pariwisata sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi ataupun memaksakan karena sudah tidak disetujui oleh pemilik lahan akan adanya pengembangan dari dinas pariwisata.

Dan anggaran dana (Mesra et al., 2023) dari pemerintah pusat juga yang sudah disiapkan untuk membangun dan mengembangkan objek wisata puncak penenteng juga sudah dikembalikan jadi sudah tidak ada lagi pengembangan dari dinas pariwisata untuk objek wisata puncak panenteng.

D. Simpulan

Hasil temuan mengungkapkan bahwa masyarakat pemilik objek wisata Puncak Panenteng ingin mengelola dan mengembangkan sendiri objek wisata Puncak Panenteng dan tidak memberikan izin kepada Dinas Pariwisata untuk mengelola dan mengembangkan objek wisata Puncak Panenteng karena pemilik lahan tidak menginginkan pemerintah untuk memiliki akses ke tanah pribadi mereka. Menjadi objek wisata sekaligus tempat menanam bagi masyarakat desa Tola. Objek wisata puncak Panenteng juga dikelola dan difasilitasi oleh pemerintah desa Tola. Pemerintah desa Tola membangun jalur akses dari desa Tola menuju destinasi wisata puncak Panenteng sebagai salah satu layanannya.

E. Daftar Pustaka

- Afrizal, M. A. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.*
- B, H. G., & Mesra, R. (2023). *Implementation of the Community Development Program in the Mining Circle Community in the East Bolaang Mongondow Regency* (Issue 22). Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0>
- Blackburn, S. (1999). Women and citizenship in Indonesia. *Australian Journal of Political Science*, 34(2), 189–204.
- Gugule, H., Mesra, R., Peran, K. K., Pengembangan, P., Masyarakat, P., & Tanaman, I. (2022). *Peran Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Dalam Inovasi Tanaman Coklat Pada Kelompok Tani Di Desa Mopusi Kabupaten Bolaang Mongondow.* 7(4), 816–822.

- Hidayat, M. F., Mesra, R., & Ambon, I. (2023). *Pola Adaptasi Sosial Masyarakat Pindahan Desa Motoling di Dusun Jauh Pelita , Desa Tondei , Motoling Barat*. 9(2). <https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.5102/http>
- Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Pres, TT.
- Isdarmanto, I. (2020). Strategi Branding Pengembangan Industri Pariwisata 4.0 melalui Kompetitif Multimedia di Era Digital. *Journal of Tourism and Creativity*, 4(1), 1–20.
- Jayanti, N. P. (2019). Pengembangan Objek Wisata Pantai Gandorih Kota Pariaman. *Jurnal Pariwisata*, 6(2), 141–146.
- Mesra, R. (2023a). *Adat, Sejarah Dan Budaya Nusantara*. Akademia Pustaka.
- Mesra, R. (2023b). *Buku Ajar Hukum Dagang*. PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Mesra, R., Marsa, Y. J., & Putri, M. E. (2021). Pola Interaksi Pedagang Konsinyasi Dengan Pemilik Warung Di Kecamatan Tondano Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), 1–8. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2104>
- Mesra, R., Werek, A. C., Kasenda, M. A., & Sidayang, S. (2023). *Efektivitas Penyaluran Dana Desa pada Bidang Peternakan dan Pertanian di Desa Rumooong Atas Dua , Tareran Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014*. 7(2), 1030–1039. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4682/http>
- Osin, R. F., Kusuma, I. R. W., & Suryawati, D. A. (2019). Strategi Pengembangan Objek Wisata Kampung Tradisional Bena Kabupaten Ngada-Flores Nusa Tenggara Timur (NTT). *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 14(1).
- Pariwisata, K., & Kreatif, E. (2018). *Rencana Strategis. Kementerian Pariwisata, 2019*.
- Pradana, M. I. W., & Mahendra, G. K. (2021). Analisis dampak covid-19 terhadap sektor pariwisata di objek wisata goa pindul kabupaten gunungkidul. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(2), 73–85.
- Soemitra, A., Kusmilawaty, S. E., Ak, M., & Tri Inda Fadhila Rahma, M. E. I. (2022). *Bisnis Souvenir, Pariwisata dan Perekonomian Daerah di Indonesia*. Merdeka Kreasi Group.
- Yakup, A. P. (2019). *Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Universitas Airlangga.